

**URGENSI UNDANG-UNDANG DAERAH KEPULAUAN
DALAM MENGATASI KETIMPANGAN FISKAL DI DAERAH
KEPULAUAN (STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI



**MUHAMMAD IDLAL FARHAN
NIM. 2105040090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

**URGENSI UNDANG-UNDANG DAERAH KEPULAUAN
DALAM MENGATASI KETIMPANGAN FISKAL DI DAERAH
KEPULAUAN (STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



**MUHAMMAD IDLAL FARHAN
NIM. 2105040090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Swt., sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua saya, atas pengorbanan dan perjuangannya yang sangat luar biasa, serta seluruh keluarga dan orang-orang yang saya sayangi atas dukungannya yang luar biasa.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Idlal Farhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2105040090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan
dalam Mengatasi Ketimpangan Fiskal di
Daerah Kepulauan (Studi di Provinsi
Kepulauan Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 04 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Idlal Farhan
NIM. 2105040090

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Idlal Farhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2105040090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan
Dalam Mengatasi Ketimpangan Fiskal Di
Daerah Kepulauan (Studi Di Provinsi
Kepulauan Riau)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 26 Januari 2026 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. Assoc. Prof. Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H.
NIP. 197208282024212002 | Ketua | (.....) |
| 2. Assoc. Prof. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
NIP. 198109292015041002 | Anggota 1 | (.....) |
| 3. Assist. Prof. Irman, S.H., M.H.
NIP. 198812252019031010 | Anggota 2 | (.....) |
| 4. Assist. Prof. Dr. Bismar Arianto, S.Sos., M.Si
NIP. 198005292014041001 | Anggota 3 | (.....) |
| 5. Assist. Prof. H. Hendra Arjuna, S.H., M.H.
NIP. 196612021997031003 | Anggota 4 | (.....) |

Disahkan Oleh:
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS
NIP. 198207072015041002

**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN**

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Idlal Farhan

Nomor Induk Mahasiswa : 2105040090

Program Studi/Departemen/
Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan
dalam Mengatasi Ketimpangan Fiskal di
Daerah Kepulauan (Studi di Provinsi
Kepulauan Riau)

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diseminarkan.

Menyetujui, tanggal: 12/5-26
Pembimbing Utama

Menyetujui, tanggal: 15/05-2026
Pembimbing Pendamping,


Dr. Oksep Adhavanto, S.H., M.H.
NIP.198109292015041002


Irman, S.H., M.H.
NIP. 198812252019031010

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Dr. Endri, S.H., M.H.
NIP.198806262014041001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.PI., DEA. sebagai Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Dr. Endri, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
4. Dr. Muhammad Fajar Hidayat. S.H., M.H. sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama yang sudah memberikan masukan serta saran guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
6. Irman, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang sudah memberikan masukan serta saran guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini;

7. Drs. Ismeth Abdullah, selaku DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, yang sudah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;
8. Zikrianul Fitrah, S.Sos., selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau
9. Drs. Zaenal Arifin, selaku Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang sudah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;
10. Dr. Bismar Arianto, S.Sos., M.Si., selaku akademisi dan pakar ilmu pemerintahan, yang sudah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;
11. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas cinta, kasih, doa, dan dukungan serta pengorbanan tanpa henti yang selalu menjadi sumber kekuatan penulis hingga sampai pada titik ini;
12. Bapak/Ibu Dosen Program studi Ilmu Hukum yang sudah banyak memberi ilmunya pada penulis serta semua staf yang sudah memberi pelayanan pada penulis selama masa perkuliahan;
13. Sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan secara langsung kepada penulis; dan
14. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021, yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga selesai;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tanjungpinang, 04 Februari 2026



Muhammad Idlal Farhan
NIM. 2105040090



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Muhammad Idlal Farhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2105040090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan dalam Mengatasi Ketimpangan Fiskal di Daerah Kepulauan (Studi di Provinsi Kepulauan Riau)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 04 Februari 2026
Yang Menyatakan,

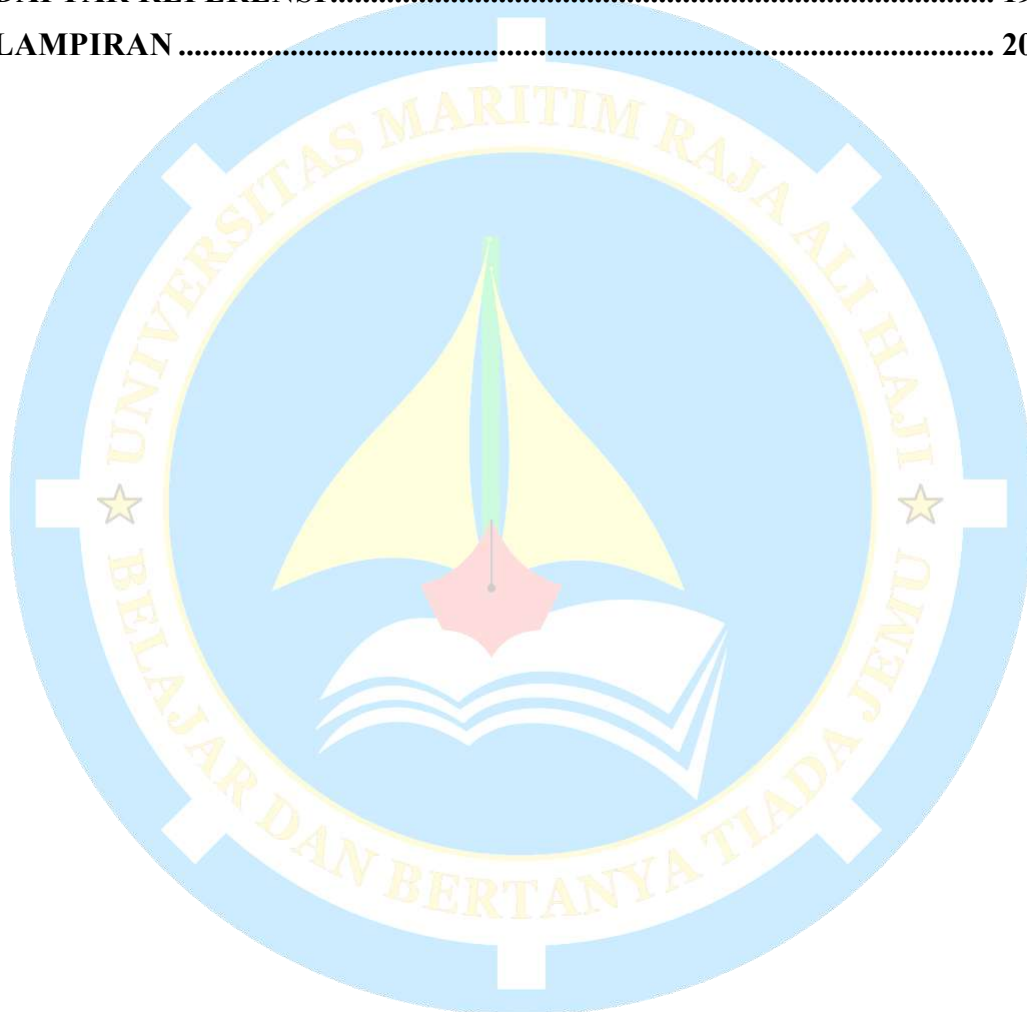


Muhammad Idlal Farhan
NIM. 2105040090

DAFTAR ISI

SAMPUL (<i>COVER</i>)	
HALAMAN JUDULSKRIPSI.....	i
PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Pustaka	20
2.2. Kerangka Teori.....	48
2.3. Kerangka Pemikiran	59
2.4. Definisi Konsep	59
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	63
3.1. Pendekatan Penelitian.....	63
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian.....	64
3.3. Fokus Penelitian	64
3.4. Sumber Data	65
3.5. Teknik Pengumpulan Data	66
3.6. Informan	67
3.7. Teknik Analisis Data	67
3.8. Jadwal Penelitian	69
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian	70
4.2. Hasil Penelitian.....	84
4.2.1. Urgensi Filosofis: Reorientasi Paradigma Keadilan Distributif dan Pengakuan Konstitusional Karakteristik Kepulauan	86
4.2.2. Urgensi Sosiologis: Realitas Disparitas Fiskal dan Dampak Sistematis Pada Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Kepulauan	91

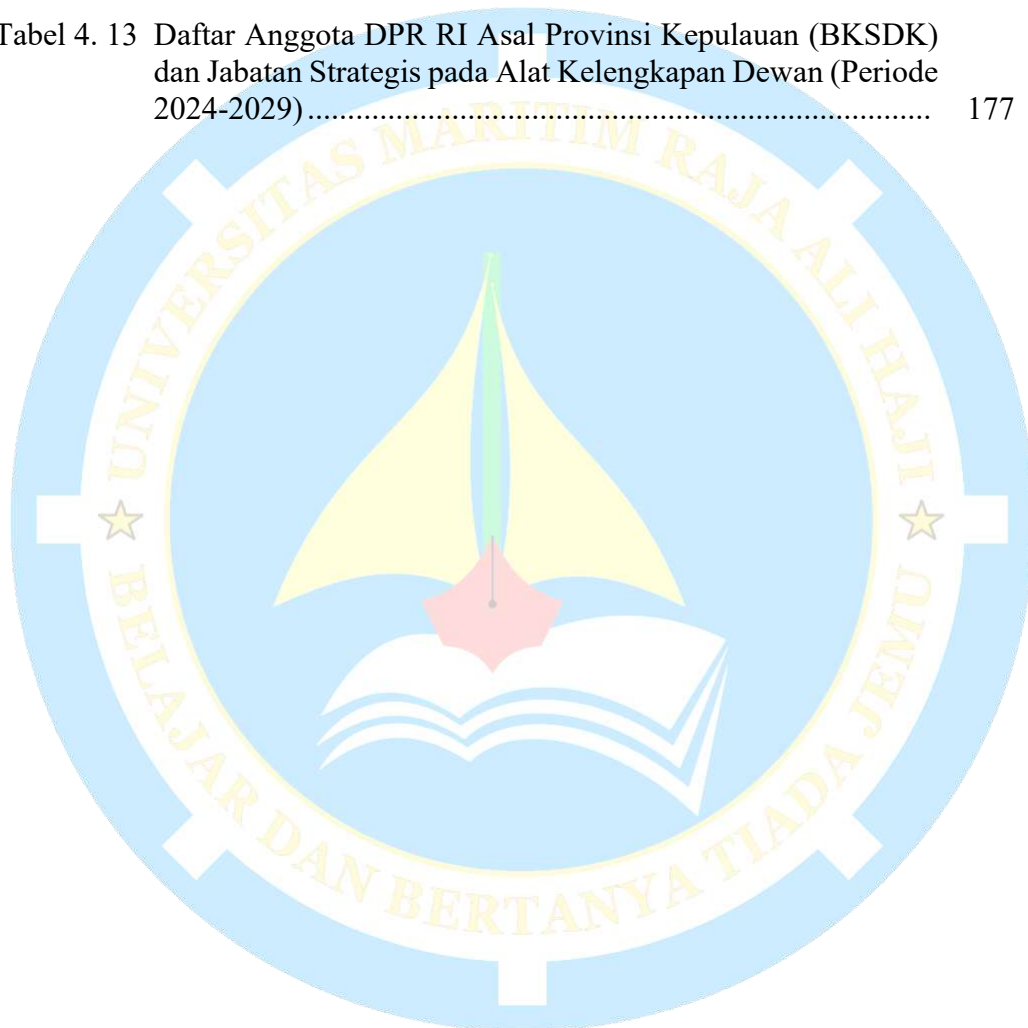
4.2.3. Urgensi Yuridis: Konstruksi Hukum Dana Khusus Kepulauan (DKK) dan Afiriasi Indeks Kemahalan Konstruksi dalam Pasal 29 dan 30 Draf RUU Daerah Kepulauan	133
4.2.4. Urgensi Politis: Dinamika Legislasi dan Hambatan Politik Anggaran dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Daerah Kepulauan.....	168
BAB 5 PENUTUP.....	188
5.1. Kesimpulan.....	188
5.2. Saran	190
DAFTAR REFERENSI.....	192
LAMPIRAN	203



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perbandingan Dana Alokasi (Pagu) Perimbangan/TKD Provinsi Daratan dan Provinsi Kepulauan Yang Tergabung Ke Dalam BKSDK (dalam ribuan rupiah)	9
Tabel 1. 2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat/TKD Provinsi Daratan dan Provinsi Kepulauan Yang Tergabung Ke Dalam BKSDK Terhadap Pendapatan Daerah Dalam Realisasi Anggaran APBD (dalam miliar rupiah)	10
Tabel 1. 3	Perbandingan IKK Provinsi Daratan dan Provinsi Kepulauan Yang Tergabung Ke Dalam BKSDK	14
Tabel 3. 1	Data Informan	67
Tabel 3. 2	Jadwal Penelitian	69
Tabel 4. 1	Pelaksanaan APBD di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 s.d 2024 (Dalam Miliar Rupiah)	91
Tabel 4. 2	Alokasi Anggaran (Pagu) Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Dalam Miliar Rupiah)	98
Tabel 4. 3	Jumlah Pulau dan Jarak Tempuh Kabupaten/Kota ke Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	101
Tabel 4. 4	Perbandingan Realisasi TKD Berbasis Luas Daratan dan Jumlah Penduduk (Tahun 2024)	103
Tabel 4. 5	Jumlah Satuan Pendidikan (Sekolah & Perguruan Tinggi) Per Jenjang Menurut Provinsi (Tahun 2024)	108
Tabel 4. 6	Jumlah Tenaga Pendidik (Guru & Dosen) Per Jenjang Menurut Provinsi (Tahun 2024)	111
Tabel 4. 7	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi (Tahun 2024)	114
Tabel 4. 8	Ketersediaan Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi (Tahun 2023)	118
Tabel 4. 9	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Tahun 2024)	122

Tabel 4. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (Tahun 2024).....	125
Tabel 4. 11 Perbandingan Rasio dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	142
Tabel 4. 12 Simulasi Alokasi Dana Khusus Kepulauan (DKK) Berdasarkan Pagu DTU	156
Tabel 4. 13 Daftar Anggota DPR RI Asal Provinsi Kepulauan (BKSDK) dan Jabatan Strategis pada Alat Kelengkapan Dewan (Periode 2024-2029)	177



DAFTAR GAMBAR

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	59
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Draf Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan	203
Lampiran 2	Daftar pertanyaan wawancara bersama DPD RI Provinsi Kepulauan Riau	241
Lampiran 3	Daftar pertanyaan wawancara bersama bersama Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	244
Lampiran 4	Daftar pertanyaan wawancara bersama Kepala Subbidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	246
Lampiran 5	Daftar pertanyaan wawancara bersama Dr. Bismar Arianto, S.Sos., M.Si. Selaku Akademisi	248
Lampiran 6	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kepada Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau	252
Lampiran 7	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	253
Lampiran 8	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	254
Lampiran 9	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kepada Dr. Bismar Arianto, S.Sos., M.Si. Selaku Akademisi	255
Lampiran 10	Surat Pemberian Izin Penelitian dari DPD RI Provinsi Kepulauan Riau	256
Lampiran 11	Surat Pemberian Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau untuk Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	257
Lampiran 12:	Surat Pemberian Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	